

## ABSTRAKSI

Desentralisasi fiskal merupakan konsep dalam otonomi daerah untuk mengatur kemandirian lokal suatu daerah. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata desentralisasi ini belum bisa memperbaiki penyediaan layanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat terlihat selama tahun 2006 sampai tahun 2011 penyediaan layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan belum memenuhi target yang ditetapkan. Serta dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah juga Belum memenuhi target yang ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap efisiensi sektor publik dan pertumbuhan ekonomi pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: *Public Sector Performance* (PSP) dan *Public Sector Efficiency* (PSE), sedangkan mengukur efisiensi sektor publik dan regresi linear (OLS) dengan *common effect* untuk mengukur pengaruhnya ke pertumbuhan ekonomi. Keduanya menggunakan rentang waktu penelitian 2006-2011. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dan literatur-literatur lainnya seperti buku-buku, dan jurnal-jurnal ekonomi.

Hasil analisa efisiensi sektor publik menunjukkan bahwa di Provinsi Jawa Tengah penyediaan layanan publik yang efisien hanya terjadi di kota besar saja. Sedangkan pada daerah Kabupaten masih mendapatkan skor efisien dibawah rata-rata. Kemudian analisa regresi menunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal, pajak daerah, tenaga kerja dan aglomerasi menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

**Kata kunci :** Otonomi Daerah, Desentralisasi Fiskal, Penyediaan Layanan Publik, Pertumbuhan Ekonomi